

na-dana itu bisa digunakan untuk membangun misalnya pariwisata di desa. Sekarang banyak orang kota yang kepingin melihat desa lagi seperti apa,” kata Presiden Jokowi dalam acara “Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019” di Palembang Sport and Convention Center, Sumatera Selatan, Minggu (25/11).

Kebijakan dana desa, dalam tahapan-tahapan selanjutnya, diharapkan tidak semata untuk pembangunan in-

gunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di pedesaan. Salah satunya dengan memanfaatkan dana desa untuk menanggulangi masalah gizi buruk dan gagal tumbuh atau *stunting* yang ada di desa-desa.

“Ini menyangkut sumber daya manusia kita ke depan. Kita ini harus bersaing dengan negara-negara lain. Kalau tidak disiapkan dari sekarang sangat berat. Kita harus ngomong apa adanya, sangat berat bersaing dengan negara-negara lain yang selalu memperbaiki SDM-nya,” tuturnya.

Desa dapat digunakan untuk membangun dan mendorong pariwisata di suatu desa.

“Selain infrastruktur, dana-dana itu bisa digunakan untuk membangun misalnya pariwisata di desa. Sekarang banyak orang kota yang kepingin melihat desa lagi seperti apa,” tegas Presiden.

Contoh Nyata

Jokowi kemudian memberikan satu contoh nyata mengenai transformasi desa yang dahulu dapat dikatakan sebagai desa tertinggal yang dihindangi masalah kemiskinan dan pengangguran

“Sudah sebulan ini kita kaji terus sehingga seminggu kemarin kita memutuskan untuk karet yang harganya jatuh jadi Rp 6.000 (per kg), saya sudah perintahkan untuk Menteri PU, Pak Dirjen, petani karet di tempat lain, saya sampaikan bahwa Kementerian PU akan beli langsung dari koperasi atau petani,” kata Presiden Jokowi dalam acara penyerahan SK Perhutanan Sosial di Taman Wisata Alam Pundi Kayu Palembang, Minggu (25/11).

Presiden menambahkan, Kementerian PUPR akan membeli dengan harga lebih tinggi dari pasaran berkisar Rp 7.500 - Rp 8.000 per kg. Kepala Negara menerima curahan hati seorang petani karet di Palembang, sekaligus sebagai alat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta. [Ant/E-8]

Presiden Jokowi pun kemudian menjelaskan bahwa komoditas karet dan juga sawit merupakan komoditas global yang harganya ditentukan pasar internasional dimana saat ini semuanya turun. Turun semuanya. Tidak hanya Indonesia yang kena masalah ini. Semua negara penghasil sawit Indonesia Thailand kena semua. Karet juga sama belakangan harganya turun. Itu komoditas global internasional. Harga kita enggak mungkin bisa ikut campur, katanya.

Namun, tak lama lagi, khususnya di Sumsel, Presiden memastikan Kempura akan membeli karet dari petani dengan harga kompetitif. [Ant/E-8]

Bambang yang disambut tepuk tangan rekan-rekannya sesama petani.

Presiden Jokowi pun kemudian menjelaskan bahwa komoditas karet dan juga sawit merupakan komoditas global yang harganya ditentukan pasar internasional dimana saat ini semuanya turun. Turun semuanya. Tidak hanya Indonesia yang kena masalah ini. Semua negara penghasil sawit Indonesia Thailand kena semua. Karet juga sama belakangan harganya turun. Itu komoditas global internasional. Harga kita enggak mungkin bisa ikut campur, katanya.

Namun, tak lama lagi, khususnya di Sumsel, Presiden memastikan Kempura akan membeli karet dari petani dengan harga kompetitif. [Ant/E-8]

Bank DKI Dukung Keterbukaan Informasi Kendaraan Bermotor

[JAKARTA] Dalam rangka mendukung Layanan Keterbukaan Informasi Polda Metro Jaya, Bank DKI bekerja sama dengan Polda Metro Jaya kembangkan sistem keterbukaan informasi Kendaraan Bermotor berupa aplikasi SMS dan USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*) Info.

“Aplikasi SMS dan USSD Info bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi data kendaraan bermotor dan besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui *smartphone*. Selain itu, aplikasi SMS & USSD Info ini juga menyediakan fitur *reminder* pembayaran PKB serta Info Samsat & SIM Keliling,” ujar Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI Priagung Suprpto

dalam siaran pers, Minggu (25/11).

Dikatakannya, untuk mewujudkan visinya menjadi bank regional modern, Bank DKI siap mendukung program Polda Metro Jaya khususnya dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara nontunai.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan DKI Jakarta dapat dilakukan dimana saja menggunakan aplikasi *JakOne Mobile*. Wajib pajak hanya perlu memasukkan nomor polisi kendaraan yang akan dibayar melalui *JakOne Mobile*.

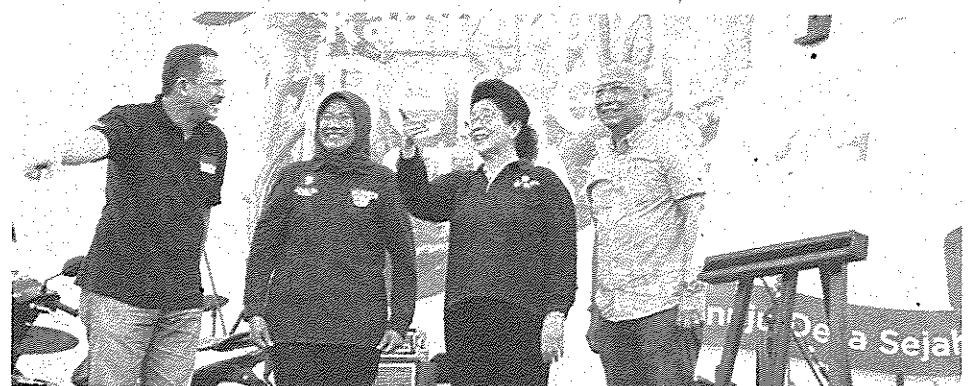
Selanjutnya, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB sesuai dengan rincian jumlah nominal PKB yang tertera. Sebagai tambahan, Wajib pajak juga bisa melakukan pembayaran PKB me-

lalui fitur *scan to pay* pada QR Code yang tersedia di kasir pembayaran SAMSAT DKI Jakarta melalui *JakOne Mobile*. Pembayaran PKB juga dapat dilakukan melalui mesin ATM dan EDC Bank DKI. “Bank DKI juga telah bekerja sama dalam memberikan pelayanan di lingkungan Samsat Polda Metro Jaya, diantaranya adalah e-Samsat, sistem antrian baru di gedung Pelayanan Satu Atap (PSA), serta layanan *less cash* dengan menyediakan loket transaksi non tunai di Samsat Polda Metro Jaya,” ungkap Priagung.

Bank DKI, sambungnya menyiapkan fasilitas pembayaran untuk para biro jasa dengan menggunakan kartu ATM Combo Bank DKI yang multifungsi untuk dapat digunakan sebagai ID Card


sekaligus sebagai alat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta. [O-2]

Festival Kampung Berseri Astra



ISTIMEWA

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kedua kanan), Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Kirana Pritasari (kedua kiri), Chief of Corporate Communications, Social Responsibility & Security PT Astra International Tbk Pongki Pamungkas (kanan) dan Head of Environment & Social Responsibility PT Astra International Tbk Riza Deliansyah (kiri) berbincang se usai penandatanganan Komitmen Peningkatan Gizi Balita di 34 Provinsi di Indonesia saat Festival Kampung Berseri Astra Kesehatan di Denpasar, Bali, Minggu (25/11). Festival Kampung Berseri Astra kali ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi untuk masyarakat Indonesia yang telah melakukan kampanye gaya hidup sehat sehari-hari.



PT ONIX CAPITAL Tbk
(Perseroan)
PEMANGGILAN KEMBALI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") DAN RAPAT UMUM
PEMANGGILAN SAHAM INDEPENDEN ("RUPS Independen")

Menunjuk kepada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diumumkan dalam Koran Harian Neraca Ekonomi tanggal 1 November 2018 dan Pengumuman Penundaan RUPSLB pada tanggal 21 November 2018 yang telah diumumkan dalam koran Suara Pembaruan, maka dengan ini Direksi Perseroan kembali mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB dan RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Rabu, 19 Desember 2018
Waktu : Pukul 10.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perseroan
Gedung Harmoni Limarga, Lantai 4
Jl Imam Bonjol No. 72, Jakarta 10310

dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

RUPS Independen:

- Persetujuan atas penjualan seluruh saham milik PT Onix Capital Tbk, pada PT Onix Sekuritas
- Persetujuan atas penjualan aset PT Menteng Medika Indonesia;

Penjelasan:

Bahwa dikarenakan kedua transaksi di atas terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara Perseroan terkait kelangsungan usahanya dan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham Perseroan, maka dengan mempertimbangkan hal tersebut dan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Perseroan akan mengadakan RUPS Independen terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dan memenuhi Peraturan IX, E, 1 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Kemudian, segala Keputusan RUPS mengenai penjualan seluruh saham PT Onix Sekuritas hanya akan efektif berlaku setelah mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB:

- Persetujuan Perubahan Susunan Direksi PT Onix Capital Tbk.

Catatan:

- Iklan merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT, Ficominindo Buana Registrar, pada tanggal 23 November 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 23 November 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari kerja di kantor Perseroan, Corporate Secretary, Gedung Harmoni Limarga lantai 4, Jl. Imam Bonjol No. 72, Jakarta 10310.
 - Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi para pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
- Bahan-bahan tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 19 Desember 2018.
- Untuk ketertiban Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 November 2018
Direksi Perseroan